



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT TINDAK LANJUT PENGAJUAN RESOLUSI *INTERNATIONAL YEAR OF PARTICIPATION ON MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIP*

- Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2020
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/ Bappenas
Acara : Rapat Tindak Lanjut Pengajuan Draft Resolusi *International Year of Participation (IYP) 2022* dan *Multi- Stakeholder Partnership*
Ketua Rapat : Wisnu Utomo (Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional
Peserta : 1. Aldi M. Alizar, Ketua *International Association for Public Participation (IAP2)* Indonesia
2. Bernadia I. Tjandradewi, Sekretaris Jenderal UCLG-ASPAC
3. Haryanti (Kasub Rapat KSI)
4. Yudi Prawira (Staf Biro KSAP)
5. Singgih Pangestu (Staf Bappenas)

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka oleh Wisnu Utomo (Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas) pada pukul 11.00 WIB.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

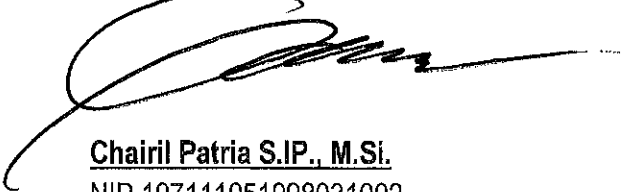
1. Mendorong Kementerian Luar Negeri agar memperjuangkan resolusi terkait dengan IYP 2022 ini di sidang ECOSOC yang diharapkan dapat diadopsi pada bulan Desember 2020. Tahun 2022 dipilih karena tahun 2021 telah dicanangkan sebagai tahun *Creative Economy*. Jika tahun 2022 tidak dapat terlaksana, maka diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2023.
2. Isu yang akan diangkat adalah upaya dalam menangani Covid-19 dengan melibatkan partisipasi semua pihak.
3. IAP2 telah melakukan lobi terhadap jaringan NGO di luar negeri, namun upaya ini belum dapat dilakukan dengan maksimal mengingat Kementerian Luar Negeri melalui perwakilannya belum melakukan langkah tindak lanjut terkait ini.
4. Kekhawatiran dari pihak Kementerian Luar Negeri dalam kaitannya dengan dukungan terhadap usulan draft ini bukanlah terhadap pemasalahan isi resolusi ini, tetapi proses dan teknis dalam rangka perjuangan pengadopsian resolusi. Seperti kita ketahui, kondisi global sedang diliputi berbagai masalah yang mendorong banyak negara fokus pada isu lainnya.

5. Dikhawatirkan jika Indonesia tidak mengambil langkah aktif, maka peran penting ini akan diambil alih oleh negara lainnya. BKSAP sebagai wadah Diplomasi Parlemen diharapkan dapat mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mengambil peran tersebut.
6. UCLG –ASPAC yang beranggotakan asosiasi pemerintahan daerah di kawasan Asia Pasific telah berupaya menggalang dukungan para pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk mendukung resolusi ini.
7. Beberapa persiapan yang dapat dilakukan terkait hal ini antara lain:
 - a. Indonesia harus melibatkan banyak negara. Beberapa negara yang harus didekati antara lain: negara-negara anggota permanen Dewan Keamanan (P5), negara-negara blok Eropa, dan negara-negara kawasan Asia Pasific maupun ASEAN.
 - b. Indonesia harus melibatkan Institusi-Institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung usulan Indonesia di sidang PBB.
 - c. Perlu pemetaan maupun pembagian tugas terkait kordinasi dan lobi. Komunikasi yang baik dengan beberapa negara melalui Kementerian Luar Negeri selama ini diharapkan dapat memudahkan lobi Indonesia. Beberapa negara tersebut antara lain: Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Selatan. UCGC EULAC juga dapat memanfaatkan jaringan pemerintahan daerah yang mereka miliki.
 - d. Mendorong terciptanya narasi kongkrit maupun regulasi dan institusionalisasi isu terkait.
8. Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon dalam pertemuan dengan IAP2 pada tanggal 8 Juni 2020 menyatakan dukungannya terhadap perjuangan resolusi ini. Hal ini selaras dengan upaya DPR RI untuk menjadi parlemen terbuka (*Open Parliament*) dan melibatkan partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
9. BKSAP DPR RI telah memiliki jaringan yang luas pada tingkatan internasional dan isu yang banyak diangkat adalah terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di sela-sela pertemuan multilateral, parlemen dapat mengadakan pertemuan bilateral untuk melakukan lobi demi kesuksesan resolusi ini. Hanya saja sebelum hal tersebut dilakukan agar narasi besar terkait resolusi ini harus rampung terlebih dahulu.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

Jakarta, 15 Juni 2020



Chairil Patria S.I.P., M.Si.
NIP.197111051998031002